

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022)

Shiva Ulqisti

Program Akuntansi, Universitas INABA, Jalan Soekarno Hatta no 448 Bandung
40266

shivaulqisti@student.inaba.ac.id

Kartika Berliani

Program Akuntansi, Universitas INABA, Jalan Soekarno Hatta no 448 Bandung
40266

kartika.berliani@inaba.ac.id

Article's History:

Received 7 Februari 2024; Received in revised form 10 Februari 2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Ulqisti, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1671-1682. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2430>

Abstrak:

Tujuan utama penelitian adalah menjelajahi bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memainkan peran utama dalam membangun visi pemerintah daerah melalui belanja modal yang cerdas dan efektif. Metode Kuantitatif dengan penyampaian deskriptif dan verifikatif telah diterapkan di penelitian ini, sedangkan Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian merupakan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022. Sumber data didapatkan melalui situs resmi kementerian keuangan yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, kemudian data sekunder didapatkan dengan memanfaatkan media internet dan literatur terkait. Pada penelitian ini, digunakan metode sampel non-probability sampling, yaitu metode sampling jenuh yang memanfaatkan keseluruhan populasi yang ada sebagai sampel. Dalam konteks ini, populasi yang digunakan sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota yang berada didalam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil uji statistik, disimpulkan bahwa variabel Brand Image, Harga dan Lokasi mempengaruhi keputusan pembelian secara bersamaan. Hasil temuan uji hipotesis menentukan keputusan diterimanya hipotesis. Dengan demikian, dengan Fhitung 31,544 dan p-value (sig) 0,000, H5 diterima, yang memaparkan bahwa Brand Image, Harga dan Lokasi memegang pengaruh bersamaan pada Keputusan Pembelian. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memberikan hubungan simultan sebesar 70,5% dan pengaruh faktor lain menyumbang 29,5% sisa.

Keywords: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil, Dan Belanja Modal

JEL Classification: M4; M41.

Pendahuluan

Perekonomian global tahun 2023 masih penuh ketidakpastian hingga akhir tahun. Ketidakpastian ini diakibatkan oleh perubahan negara-negara kuat yang memiliki pengaruh global. Amerika Serikat menghadapi inflasi tinggi di atas target, suku bunga yang tinggi, beban fiskal yang meningkat, dan excess saving yang melemahkan ekonomi, (Johan, 2022). Negara maju lain, seperti RRT dan Eropa, juga mengalami masalah ekonomi pasca Covid-19, dengan defisit fiskal meningkat dan inflasi inti yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global direvisi turun menjadi 3% oleh IMF dan 2,1% oleh Bank Dunia. Inflasi diprediksi mencapai 5,8%, lebih tinggi dari sebelum pandemi. Dalam laporan tahunan DJPK 2022, belanja Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan hampir mencapai 97,71% dari pagu belanja dalam DIPA, setelah dikurangi pengembalian belanja. Pagu anggaran TA 2022 menghadapi kemerosotan signifikan yaitu 24,37% dibandingkan dengan TA 2021, disebabkan oleh pelimpahan pembayaran belanja gaji ke Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 107/KM.01/2022 telah diubah menjadi No. 249/KMK.01/2022, (Intoniswan, 2023).

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode Desember 2022 dan 2021

Uraian	2022		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	187.642.654	-	158.592.512
Jumlah Pendapatan	-	187.642.654	-	158.592.512
Belanja Pegawai	13.931.013.000	13.671.787.310	37.495.827.000	36.981.249.712
Belanja Barang	37.583.647.000	36.648.320.288	30.554.813.000	28.731.774.765
Belanja Modal	3.363.816.000	3.300.891.450	4.5008.385.000	4.425.292.606
Jumlah Belanja	54.878.476.000	53.620.999.048	72.559.025.000	70.138.317.083

Sumber: Laporan Tahunan DJPK 2022, (Dalam Rupiah)

Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat dua konsep dasar yang memegang peranan penting dalam perekonomian, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua konsep tersebut mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, (Ulum & Gisela Syaputri, 2021). Pemerintah daerah memberikan APBD yang meliputi dana belanja modal untuk mengembangkan aset tetap bersama beberapa aset lain yang memiliki kegunaan selama lebih dari satu periode akuntansi. Pendanaan akan bersarakan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, serta untuk memenuhi kebutuhan ruang publik dan memastikan operasi pemerintahan berjalan lancar., (Prastiwi & Aji, 2020).

Pada tahun 2022, Anggaran sebesar Rp44,08 triliun dari APBN diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berbagai program dan belanja pemerintah. Dari total alokasi, sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Pegawai (43,86%), diikuti oleh Belanja Barang (37,20%), Belanja Modal (18,82%), dan Bantuan Sosial (0,12%). Realisasi belanja APBN di Jawa Barat pada triwulan II 2022 mencapai 39,56% dari alokasi yang direncanakan, lebih rendah dari tahun sebelumnya karena penurunan realisasi Belanja Modal. Alokasi Transfer Ke Dana Daerah (TKDD) secara keseluruhan turun 6,37% dibanding tahun sebelumnya, terutama diakibatkan oleh kemerosotan pagu anggaran untuk Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2022).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan yang didapatkan daerah dari pungutan yang sejalan dengan aturan daerah dan perundang-undangan. Temuan penelitian (Muttaqin et al., 2021) memaparkan bila secara parsial, Anggaran Asli Daerah mempunyai dampak signifikan pada Belanja Modal. Namun, (Suryani & Pariani, 2018) memaparkan jika secara parsial, Pendapatan Asli Daerah tidak memegang pengaruh yang kuat terhadap Belanja Modal.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana APBN yang disalurkan pada daerah tertentu agar dapat mendukung kegiatan khusus yang berupa kewenangan daerah. Penelitian oleh (Suryani & Pariani, 2018) memaparkan bila Dana Alokasi Khusus secara parsial memegang dampak pada Belanja Modal. Namun, dalam temuan (Huda & Sumiati, 2019), Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai pengaruh pada Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam UU yang sama juga menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dana APBN yang disalurkan pada daerah penghasil untuk menurunkan tingkat ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian oleh (Marliana et al., 2022) memaparkan bahwa secara keseluruhan, Dana Bagi Hasil memegang dampak pada Belanja Modal, tetapi secara parsial tidak memegang memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Modal.

Tabel 2. Data Realisasi Anggaran Kabupaten & Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD %	DAK %	DBH %	Belanja Modal %
Kota Depok	2021	114,94	60,91	99,78	86,04

	2022	109,25	90,91	102,63	106,28
Kab. Bekasi	2021	100,54	85,75	99,94	69,34
	2022	100,89	80,80	103,03	89,92
Kota Cirebon	2021	77,59	65,55	99,69	98,95
	2022	99,80	98,13	91,61	114,31

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> (Data Diolah 2024)

Berdasarkan temuan di atas, maka bisa diketahui bila Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 5,69%, dari 114,94% menjadi 109,25% pada tahun 2022. Namun persentase Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 20,24%, dari 86,04% menjadi 106,28% pada tahun 2022.

Hasil tidak selaras dengan teori yang dari (Hoesada, 2016), dimana peningkatan besar alokasi belanja modal akan selaras dengan peningkatan besar Pendapatan Asli Daerahnya, dan sebaliknya. Semakin kecil belanja modal akan membuat semakin kecil pula Pendapatan Asli Daerahnya. Kemudian dikuatkan oleh hasil penelitian terdahulu yang diapaparkan oleh (Muttaqin et al., 2021), dimana secara parsial PAD memegang dampak kuat pada belanja modal. Sedangkan menurut (Suryani & Pariani, 2018) menunjukan bila secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak memegang dampak yang kuat pada Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 1, maka dapat ditemukan jika Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021-2022 menghadapi kemerosotan sebesar 4,95%, dari 85,75% menjadi 80,80% pada tahun 2022. Namun persentase Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 20,58%, dari 69,34% menjadi 89,92% pada tahun 2022. Temuan ini bertentangan dengan PP No. 55 Tahun 2005, yang menetapkan bahwa DAK ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan adalah tanggung jawab nasional, selaras dengan fungsi yang adalah perwujudan tugas pemerintahan pada bidang tertentu, terutama pada hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan umum masyarakat. Studi sebelumnya (Khulwani et al., 2022) memaparkan bahwa DAK memegang pengaruh pada belanja modal secara parsial, meskipun temuan sebelumnya (Huda & Sumiati, 2019) menunjukkan bahwa DAK tidak memegang pengaruh pada belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel 1, maka ditemukan bahwa Dana Bagi Hasil di Kota Cirebon pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,08%, dari 99,69% menjadi 91,61% pada tahun 2022. Namun persentase Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 15,36%, dari 98,95% menjadi 114,31% pada tahun 2022. Temuan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 terkait Dana Perimbangan, yang memaparkan bila DBH adalah dana yang berasal dari APBN yang dibagi dibagikan kepada daerah sesuai angka presentase dan pertimbangan potensi dari daerah penghasil. Pemerintah daerah menentukan belanja modal yang cukup besar untuk mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar. Kebalikannya, semakin kecil belanja modal, semakin kecil dana bagi hasil yang akan ditetapkan. Penelitian sebelumnya (Mariana et al., 2022) menunjukkan bila Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Modal secara bersamaan, tetapi tidak secara signifikan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, akuntansi pemerintah merupakan rangkaian aktivitas yang menyampaikan data keuangan pemerintah berdasarkan pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pemaparan transaksi keuangan pemerintah. Namun, menurut (Arif, 2018), akuntansi pemerintah adalah aktivitas yang pemberian informasi keuangan pemerintah didasarkan pada pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah. Dari kedua pengertian tersebut, akuntansi pemerintahan adalah layanan keuangan yang mempunyai tujuan untuk menyumbangkan informasi pada pihak tertentu dari penganggaran hingga pelaksanaan, dengan tujuan bukan untuk menghasilkan keuntungan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan diciptakan untuk menyampaikan informasi tentang keadaan keuangan dan transaksi suatu entitas dalam satu periode.

Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta membantu pengambilan keputusan. Menurut (Supriyadi, 2017) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah di kerangka otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran

Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran adalah ringkasan tentang sumber daya keuangan yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah, perbandingan anggaran dengan pelaksanaannya pada satu periode pelaporan. Menurut (Noerdiawan & Hertianti, 2016), Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan ringkasan tentang sumber daya keuangan yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah, dan membandingkan pendanaan dengan pelaksanaannya pada satu periode.

Belanja Modal

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan belanja rutin yang meliputi biaya pemeliharaan dalam kelompok belanja administrasi umum. Pengeluaran ini dilakukan lebih dari satu tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, PAD merupakan perolehan yang didapatkan daerah melalui pungutan yang sesuai aturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam temuan (Mardiasmo, 2019), PAD melingkupi perolehan dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, pendanaan daerah, hasil yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah.

Dana Alokasi Khusus

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, DAK adalah dana dari APBN yang diberikan pada daerah tertentu dengan tujuan utama untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab daerah.

Dana Bagi Hasil

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, DBH merupakan dana dari perolehan khusus APBN yang diberikan pada daerah penghasil dengan persentase dan potensi tertentu, yang memiliki tujuan untuk menurunkan kesenjangan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan

Metodologi

Tujuan utama penelitian adalah menjelajahi bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memainkan peran utama dalam membangun visi pemerintah daerah melalui belanja modal yang cerdas dan efektif. Metode Kuantitatif dengan penyampaian deskriptif dan verifikatif telah diterapkan di penelitian ini, sedangkan Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian merupakan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022. Sumber data didapatkan melalui situs resmi kementerian keuangan atau <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, kemudian data sekunder didapatkan dengan memanfaatkan media internet dan literatur terkait, (Waskito et al., 2019).

Pada penelitian ini, digunakan metode sampel non-probability sampling, yaitu metode sampling jenuh yang memanfaatkan keseluruhan populasi yang ada sebagai sampel, (Selina & Gantino, 2024). Mengutip (Hartono, 2019), sampel jenuh adalah metode di mana keseluruhan anggota populasi dimanfaatkan sebagai sampel, terutama ketika jumlah populasi kurang dari 30. Dalam konteks ini, populasi yang digunakan sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota yang ada didalam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No.	Kode	Kabupaten/Kota	No.	Kode	Kabupaten/Kota
1.	KB	Kabupaten Bandung	15.	KS	Kabupaten Subang
2.	KBB	Kabupaten Bandung Barat	16.	KSM	Kabupaten Sukabumi
3.	KBI	Kabupaten Bekasi	17.	KSG	Kabupaten Sumedang
4.	KBO	Kabupaten Bogor	18.	KT	Kabupaten Tasikmalaya
5.	KC	Kabupaten Ciamis	19.	KBG	Kota Bandung
6.	KCR	Kabupaten Cianjur	20.	KBR	Kota Banjar
7.	KBN	Kabupaten Cirebon	21.	KBS	Kota Bekasi
8.	KG	Kabupaten Garut	22.	KBOR	Kota Bogor
9.	KI	Kabupaten Indramayu	23.	KCH	Kota Cimahi
10.	KK	Kabupaten Karawang	24.	KCN	Kota Cirebon
11.	KKN	Kabupaten Kuningan	25.	KDK	Kota Depok
12.	KM	Kabupaten Majalengka	26.	KSM	Kota Sukabumi
13.	KP	Kabupaten Pangandaran	27.	KTM	Kota Tasikmalaya
14.	KP	Kabupaten Purwakarta			

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Diolah 2024

Gambar 1. Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Hasil dan Pembahasan

Temuan Deskriptif

Tabel 3. Temuan Statistik Belanja Modal

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	216	32,00%	317,27%	115,0129%	47,03262%
Valid N	216				

Sumber: Output SPSS, 2024

Temuan analisis deskriptif variabel Belanja Modal (Y) menunjukkan bahwa nilai minimum terjadi pada Kabupaten Majalengka dengan persentase 32,00% pada tahun 2022 dan nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase 317,27% pada tahun 2017. Adapun rata-rata Belanja Modal yaitu 115,0129% dan standar deviasi yaitu 47,03262%. Maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Majalengka pada tahun 2015-2017 mendapat peningkatan, tapi di tahun 2017-2022 cenderung mengalami kemerosotan. Lalu pada Kabupaten Tasikmalaya mengalami fluktuasi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan keuangan daerah dengan baik dan efektif untuk masyarakat dan diharapkan dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. Temuan Statistik Pendapatan Asli Daerah

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	216	42,16%	190,31%	102,6895%	21,20418%
Valid N	216				

Sumber: Output SPSS, 2024

Temuan analisis deskriptif variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan bahwa perolehan minimum terjadi pada Kabupaten Pangandaran dengan persentase 42,16% pada tahun 2020 dan perolehan maksimum terjadi pada Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase 190,31% pada tahun 2017. Adapun rata-rata (mean) Pendapatan Asli Daerah yaitu 102,6895% dan standar deviasi yaitu 21,20418%. Maka dapat diketahui bahwa

Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2020 cenderung menghadapi kemeresotan, dan di tahun 2020-2022 cenderung mengalami kenaikan. Menurut Carunia (2017:2), Pendapatan Asli Daerah dikategorikan baik untuk membiayai pembangunan daerah apabila taraf pencapaiannya melebihi 70% dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah. Dari tabel 4.5 rata-rata Pendapatan Asli Daerah tergolong efektif dan efisien karena untuk pemungutan terhadap potensi pajak dan pendanaan daerah sudah dilakukan dengan maksimal, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan melalui pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan milik, dan sumber lain.

Tabel 5. Temuan Statistik Dana Alokasi Khusus

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Dana Alokasi Khusus	216	5,00%	101,64%	87,4245%	13,55399%
Valid N	216				

Sumber: Output SPSS, 2024

Temuan analisis deskriptif variabel Dana Alokasi Khusus (X2) menunjukkan bahwa perolehan minimum terjadi di Kota Tasikmalaya dengan persentase 5,00% pada tahun 2015 dan nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Sumedang dengan persentase 101,64% pada tahun 2018. Adapun rata-rata Dana Alokasi Khusus sebesar 87,4245% dan standar deviasi yaitu 13,55399%. Maka dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang cenderung mengalami fluktuasi. Hasil ini menandakan bila peran Pemerintah Daerah belum bisa memanfaatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat secara baik dan tepat. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah demi meningkatkan pelayanan kegiatan secara khusus untuk masyarakat.

Tabel 6. Temuan Statistik Dana Bagi Hasil

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Dana Bagi Hasil	216	5,81%	134,24%	87,0626%	18,21655%
Valid N	216				

Sumber: Output SPSS, 2024

hasil analisis deskriptif variabel Dana Bagi Hasil (X3) menunjukkan bahwa nilai minimum terjadi pada Kota Tasikmalaya dengan persentase 5,81% pada tahun 2015 dan nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase 134,24% di tahun 2016. Adapun rata-rata perolehan Dana Bagi Hasil yaitu 87,0626% dan standar deviasi yaitu 18,21655%. Maka dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya cenderung mengalami fluktuasi. Menurut PMK No. 03 Tahun 2007 atau Dana Bagi Hasil yang seharusnya diterima adalah sebesar 80%, oleh karena itu nilai persentase rata-rata Dana Bagi Hasil menunjukkan hasil yang kurang baik karena tidak adanya keseimbangan antara anggaran dan realisasi. Hal ini disebabkan tingginya kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pemekaran, pembangunan daerah yang kurang baik, dan tidak pastinya jumlah uang yang diterima daerah karena adanya perbedaan nilai anggaran akibat kesalahan dalam perbedaan hitung.

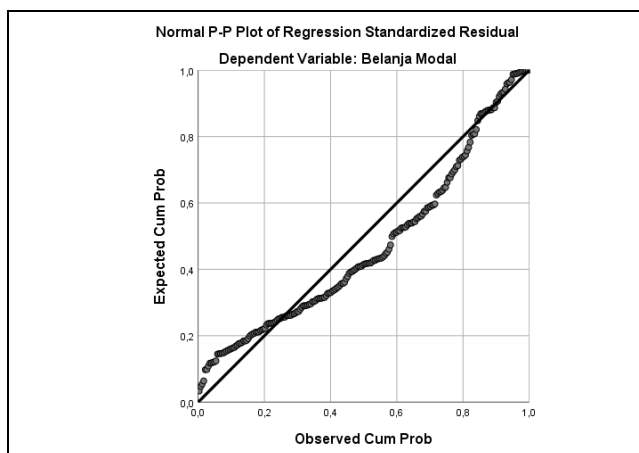
Temuan Verifikatif Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Temuan Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	216
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000 ^c

Sumber: Output SPSS, 2024

Hasil uji normalitas, menunjukan taraf signifikan yang didapatkan adalah $0,000 < 0,05$, yang artinya data yang diolah berhasil melakukan distribusi dengan cara tidak normal karena lebih tinggi dibandingkan taraf signifikan.



Sumber: SPSS, 2024

Gambar 2. Temuan Uji Normalitas

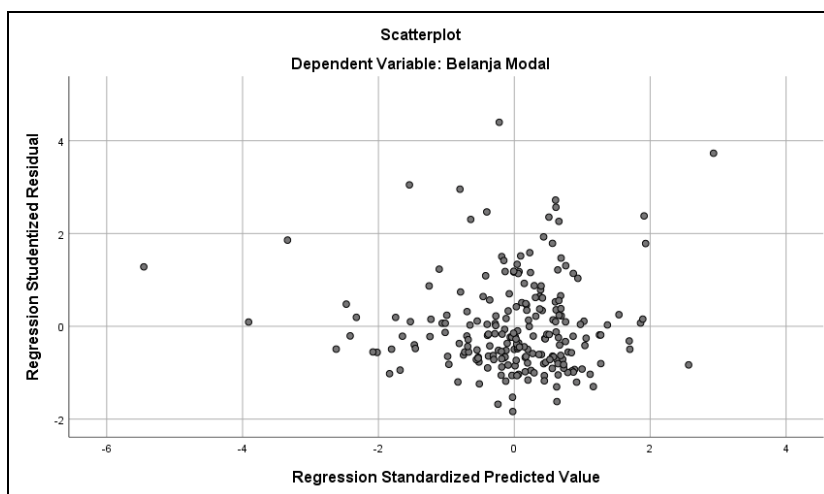
Menurut temuan gambar diatas, maka hasil memastikan jika keseluruhan titik tersebut tidak mengikuti garis diagonal, sehingga bisa ditarik kesimpulan bila data tidak berdistribusi secara normal.

Tabel 8. Temuan Multikolinearitas

Collinearity Statistics	
<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
,875	1,143
,954	1,048
,838	1,193

Sumber: Output SPSS, 2024

Temuan nilai VIF untuk seluruh variabel bernilai $< 10,00$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bila tidak terdapat Multikolinearitas yang berarti semua variabel dapat digunakan.



Gambar 3. Uji Heteroskedastistitas

Sumber: Output SPSS, 2024

Temuan gambar memastikan bila keseluruhan titik tidak menciptakan pola yang pasti dan terlihat terdapat penyebaran titik yang berada disekitar angka 0 pada sumbu Y. Hasil ini memastikan jika tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,058

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan temuan, didapatkan nilai d yaitu 1,058. Nilai ini akan dibandingkan bersama nilai dL dan dU di tabel DW, sehingga dengan $\alpha = 0,05$, $k = 3$ dan $n = 216$, telah didapatkan $dL = 1,7276$ dan $dU = 1,7909$. Maka dapat diambil keputusan $0 < d < dL$ bahwa model tersebut tidak terdapat autokorelasi positif.

Tabel 10. Temuan Regresi Linear Berganda

Coefficients^a				
Model		Unstand Coefficients		Stand Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-17,532	30,711	
	PAD	0,487	0,155	0,22
	DAK	0,705	0,233	0,203
	DBH	0,24	0,185	0,093

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan temuan, maka kita dapat membentuk persamaan regresi sebagai berikut dengan mengetahui konstanta dan koefisien regresi sebelumnya:

$$Y = -17,532 + 0,487 X_1 + 0,705 X_2 + 0,24 X_3$$

Tabel 11. Temuan Uji Korelasi Pearson

Correlations		
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	,182**
	Sig. (2-tailed)	0,007
	N	216
Dana Alokasi Khusus	Pearson Correlation	,217**
	Sig.	0,001
	N	216
Dana Bagi Hasil	Pearson Correlation	0,058
	Sig.	0,393
	N	216
Belanja Modal	Pearson Correlation	1
	Sig.	
	N	216

Sumber: Output SPSS, 2024

1. Besaran korelasi antara PAD (X1) dengan Belanja Modal (Y) secara parsial memiliki hasil sebesar 0,182, berdasarkan interval 0,00-0,199, maka terdapat keterkaitan positif yang sangat lemah antara PAD dengan Belanja Modal.
2. Besaran korelasi antara DAK (X2) dengan Belanja Modal (Y) dengan parsial memiliki hasil yaitu 0,217 berada di interval 0,20-0,399 yang artinya ditemukan korelasi positif yang lemah antara DAK dengan Belanja Modal.

3. Besaran korelasi antara DBH (X3) dengan Belanja Modal (Y) secara parsial mempunyai nilai yaitu 0,058 berada dalam interval 0,00-0,199 yang artinya ditemukan keterkaitan positif yang sangat lemah antara DBH dengan Belanja Modal.

Tabel 12. Temuan Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>DW</i>
1	,299 ^a	,090	,077	45,19072	1,058

Sumber: Output SPSS, 2024

$$K_d = (0,299)^2 \times 100\% \\ = 8,9401\%$$

Berdasarkan temuan tabel, dapat ditemukan hasil R Square yaitu 0,090 yang diartikan bila dampak PAD, DAK, dan DBH pada Belanja Modal yaitu 9%, sisanya 91% diberikan oleh pengaruh dari faktor-faktor lain.

Tabel 13. Temuan Uji T

Coefficients^a			
<i>Model</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	-0,571	0,569
	PAD	3,134	0,002
	DAK	3,028	0,003
	DBH	1,3	0,195

Sumber: Output SPSS, 2024

Dari analisis data pada tabel 4.19 dengan tingkat signifikansi α (5%) dan derajat kebebasan $df = n-k-1$, nilai t tabel adalah 1,971 dengan $df = 212$ ($216-3-1$).

1. Temuan nilai signifikansi (sig) untuk dampak PAD (X1) pada Belanja Modal (Y) yaitu 0,002 yang lebih rendah dari 0,05, serta hasil thitung sebesar 3,134 yang lebih dominan dari t tabel (1,971), sehingga bisa disimpulkan bila H1 diterima. Sehingga terbukti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) pada Belanja Modal (Y).
2. Temuan nilai signifikansi (sig) untuk DAK (X2) pada Belanja Modal (Y) yaitu 0,003 yang lebih rendah dari 0,05, serta hasil thitung sebesar 3,028 yang lebih dominan dari t tabel (1,971), sehingga disimpulkan bila H2 diterima. Artinya, terdapat pengaruh DAK (X2) pada Belanja Modal (Y).
3. Temuan nilai signifikansi (sig) untuk DBH (X3) pada Belanja Modal (Y) yaitu 0,195 > 0,05, serta hasil t hitung yaitu 1,300 < t tabel (1,971), sehingga ditemukan bila H3 ditolak dan H0 diterima. Hasil mengindikasikan jika tidak ada pengaruh Dana Bagi Hasil (X3) pada Belanja Modal (Y).

Tabel 14. Temuan Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42647,768	3	14215,923	6,961	,000 ^b
	Residual	432946,680	212	2042,201		
	Total	475594,448	215			

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.20 dengan tingkat signifikansi α (5%) dan $df = k(n-k-1)$, nilai F tabel adalah 2,65 dengan $df = 3(216-3-1) = 3;212$. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh PAD (X1), DAK (X2), dan DBH (X3) pada Belanja Modal (Y) adalah 0,000 < 0,05, dan hasil F hitung yaitu 6,961 > F_{tabel} (2,65). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bila H4 diterima dan H0 ditolak, yang mengidentifikasi adanya pengaruh PAD (X1), DAK (X2), dan DBH (X3) pada Belanja Modal (Y) secara simultan.

Pembahasan

Temuan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

Berdasarkan analisis, PAD terbukti memengaruhi Belanja Modal. Temuan uji t memaparkan hasil t hitung $3,134 > t$ tabel $1,971$, sehingga H1 diterima, menegaskan pengaruh PAD pada Belanja Modal. Temuan ini selaras dengan penelitian (Muttaqin et al., 2021) yang menunjukkan PAD memegang pengaruh signifikan pada Belanja Modal, akan tetapi studi (Suryani & Pariani, 2018) menunjukkan temuan yang sebaliknya.

Temuan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal

Temuan analisis menunjukkan bila DAK memegang pengaruh pada Belanja Modal. Uji t menunjukkan nilai thitung $3,028 > ttabel$ $1,971$, sehingga H2 diterima, menegaskan adanya pengaruh DAK pada Belanja Modal. Temuan ini sejalan dengan hasil (Khulwani et al., 2022) yang memaparkan bila DAK secara parsial mempengaruhi Belanja Modal. Meskipun demikian, hasil studi (Huda & Sumiati, 2019) dan (Lutpikah & Mahendra, 2020) menunjukkan sebaliknya, dimana tidak ditemukan pengaruh DAK pada Belanja Modal.

Temuan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal

Temuan analisis menunjukkan bila DBH tidak memegang pengaruh pada Belanja Modal. Uji t memaparkan hasil t hitung $1,300 < t$ tabel $1,971$, sehingga H3 ditolak, menunjukkan ketiadaan pengaruh DBH pada Belanja Modal. Temuan selaras dengan hasil (Marliana et al., 2022), yang memaparkan jika secara parsial DBH tidak memegang dampak secara signifikan pada Belanja Modal. Namun, DBH memegang pengaruh secara simultan pada Belanja Modal. Namun, temuan (Yuliani et al., 2021) menyajikan hasil yang bertentangan, dimana DBH memegang pengaruh pada Belanja Modal.

Temuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan temuan uji F, PAD (X1), DAK (X2), dan DBH (X3) secara simultan memegang dampak pada Belanja Modal (Y). Hasil signifikan dipaparkan oleh hasil F hitung $>$ hasil Ftabel ($6,961 > 2,65$). Koefisien determinasi (R Square) yaitu 9%, mengidentifikasi jika PAD, DAK, dan DBH secara siringan berkontribusi yaitu 9% pada variabilitas Belanja Modal, sedangkan 91% dipengaruhi oleh rangkaian faktor lain yang tidak diteliti. Koefisien determinasi ini berada pada rentang 0%-20%, yang memastikan adanya pengaruh yang sangat rendah dari ketiga variabel tersebut pada Belanja Modal.

Kesimpulan

1. Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2022, menunjukkan alokasi yang belum efektif dan efisien. Nilai minimum terjadi di Kabupaten Majalengka (32,00% pada 2022) dan maksimum di Kabupaten Tasikmalaya (317,27% pada 2017), dengan rata-rata 115,0129% dan standar deviasi 47,03262%.
2. PAD di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata di atas 70%, menunjukkan kinerja anggaran yang baik. Nilai minimum terjadi di Kabupaten Pangandaran (42,16% pada 2020) dan maksimum di Kabupaten Tasikmalaya (190,31% pada 2017), dengan rata-rata 102,6895% dan standar deviasi 21,20418%.
3. DAK di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi, menandakan pengelolaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang belum optimal. Rata-rata DAK adalah 87,4245%, dengan nilai minimum terjadi di Kota Tasikmalaya (5,00% pada 2015) dan maksimum di Kabupaten Sumedang (101,64% pada 2018), serta standar deviasi 13,55399%.
4. DBH di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata di atas 80%, menunjukkan kinerja yang kurang baik. Nilai minimum terjadi di Kota Tasikmalaya (5,81% pada 2015) dan maksimum di Kabupaten Tasikmalaya (134,24% pada 2016), dengan rata-rata 87,0626% dan standar deviasi 18,21655%.

5. Hasil uji t memastikan bila PAD (X1) dan DAK (X2) mempunyai dampak kuat pada Belanja Modal. Sementara itu, DBH (X3) tidak mempunyai dampak signifikan.
6. Hasil uji F memastikan bila PAD, DAK, dan DBH dengan cara simultan memegang pengaruh pada Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2022.

Referensi

- Arif, B. (2018). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Hartono. (2019). *Metode Penelitian*. Zanafra Publishing.
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai : Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Intoniswan. (2023). *Kondisi Perekonomian Global Masih Diliputi Ketidakpastian Hingga Akhir Tahun 2023*. <https://www.niaga.asia/kondisi-perekonomian-global-masih-diliputi-ketidakpastian-hingga-akhir-tahun-2023/>
- Johan. (2022). INOVASI DALAM TEKNOLOGI KEUANGAN: MENGUBAH PRAKTIK PERBANKAN DAN INVESTASI TRADISIONAL. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Volume, 01*, 296–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/4a2g7278>
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi*. [Www.Bi.Go.Id. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Barat-Agustus-2022.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Barat-Agustus-2022.aspx)
- Khulwani, I., Rinofah, R., & Sari, P. P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016–2020. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1050–1068. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.776>
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Mardiasmo. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. ANDI.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Noerdiawan, D., & Hertianti, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Selina, & Gantino, R. (2024). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Financial Distress"

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 102(4), 24–25.

Supriyadi, B. (2017). *Kebijakan Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia.

Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22.

Ulum, M. B., & Gisela Syaputri, A. G. (2021). Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Di Sumatera Selatan. *Mbia*, 20(2), 111–122. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383>

Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>

Yuliani, Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal*. June, 693–701. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>